



DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

2022

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu institusi karena pada LAKIP dilaporkan capaian indikator kinerja tahun 2022 yang mencakup aspek pendukung yang memberikan kontribusi bagi terwujudnya good governance dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, diharapkan sebagai upaya dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun.

Dalam penyusunan LAKIP tersebut masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang positif dan kritik yang konstruktif guna mengembangkan kinerja peneliti sehingga LAKIP tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil langkah-langkah kebijakan pada masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan ide / gagasan dalam menyusun LAKIP ini.

KEPADA

DEDY DIANTOLANI, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721222 199403 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas / kegiatan sekarang ini berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah diamanahkan / digariskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan Pelayanan atau Pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas Aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang lebih terarah, berdasarkan Renstra 2021 - 2026 dan mengaplikasikannya kepada kegiatan-kegiatan tahunan.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka dalam rangka pertanggungjawaban kinerja, Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas telah menetapkan 5 Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi Pedoman dan Pengukuran Kinerja Instansi, yaitu:

- 1) Jumlah Trayek Yang Diakses
- 2) Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
- 3) V/C Rasio di jalan Provinsi
- 4) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
- 5) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dari rata – rata capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dalam tahun 2022 nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan dengan total pagu dana Rp.17.260.017.358 pada APBD Perubahan, terealisasi sebesar Rp. 16.713.545.918,70, (96,83%), dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja gaji dan tunjangan dengan anggaran sebesar Rp.8.500.719.778, terealisasi sebesar Rp.8.221.061.578, (96,71%).
- Belanja Penunjang Urusan dengan anggaran sebesar Rp.4.326.828.998, terealisasi sebesar Rp.4.197.203.964,80, (97 %).
- Belanja urusan sebesar Rp.4.432.468.582, terealisasi sebesar Rp.4.295.280.375,90 (96,90 %)



Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 8 sub kegiatan yang realisasinya dibawah 90 % yaitu:

1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000, terealisasi sebesar Rp. 40.444.946 (89,88%). Sisa anggaran sebesar 4.555.054 merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja asuransi kendaraan, dan biaya pajak bumi dan bangunan rumah dinas tahun 2022.

2. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.128.874.750, realisasi sebesar Rp. 89.528.331 (69,47%). Sisa anggaran Rp. 39.346.419 merupakan sisa belanja lembur petugas retribusi terminal yang teranggarkan melebihi 15 jam / orang / bulan sebagaimana yang diatur Pergub SSH 2022.

3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya


Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 41.835.000, terealisasi sebesar Rp. 35.597.990,00 (85,09 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 6.237.010 merupakan Merupakan efisiensi dari belanja service Komputer, Printer, AC, dan peralatan kantor Lainnya.

4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.583.293, realisasi sebesar Rp. 8.013.250,00 (83,62 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.570.043 yang merupakan Merupakan efisiensi dari belanja Perjalanan dinas dan belanja Bahan Bakar Minyak

5. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 109.780.000, terealisasi sebesar Rp. 81.529.849,00 (74,27%), dengan sisa anggaran sebesar Rp.28.250.151. Untuk Pelaksanaan pengawasan angkutan perintis (Damri) sudah dilakukan pada semua daerah yang dilayani angkutan perintis (Kab Dharmasraya, Kab Padang Pariaman, Kab Pasaman, Kab Kep Mentawai), namun untuk sisa anggaran menjadi SILPA pada akhir tahun



yaitu terkait kurangnya volume pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan dan akan dijadikan bahan evaluasi dalam plot anggaran untuk sub kegiatan ini di tahun 2023.

6. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.80.000.000, realisasi sebesar Rp. 69.569.000 (86,96%). Sisa anggaran Rp. 10.431.000 Merupakan efisiensi anggaran berupa sisa kontrak pengadaan Paket PC dan Printer untuk mendukung pengoperasian Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU).

7. Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.34.920.000, terealisasi sebesar Rp.28.819.350,00 (82,53%). Sisa anggaran sebesar Rp. 6.100.650 merupakan Efisiensi anggaran perjalanan dinas dan BBM.

8. Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.55.251.250, realisasi sebesar Rp.46.916.595 (84,91%) dan sisa anggaran sebesar Rp.8.334.655 yang merupakan Efisiensi anggaran perjalanan dinas dan BBM.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan-penyempurnaan Kinerja Dinas untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Organisasi	1
A.1. Latar Belakang	1
A.2. Tugas pokok dan fungsi	2
A.3. Struktur Organisasi	3
A.4. Sumber daya Manusia	5
B. Aspek Strategis Organisasi	8
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	22
B. Hasil Pengukuran Kinerja	23
C. Capain Kinerja Organisasi	25
C.1 Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi)	27
C.2 Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi)	45
C.3 Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi)	55
C.4 Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi)	59
D. Realisasi Anggaran	65
BAB IV PENUTUP	74
LAMPIRAN	76



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	5
Tabel I. 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon.....	5
Tabel I. 3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	5
Tabel I. 4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Tabel I. 5	Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.....	8
Tabel II. 1	Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.....	13
Tabel II. 2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	14
Tabel II. 3	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	16
Tabel II. 4	Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.....	18
Tabel II. 5	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022	19
Tabel II. 6	saran evaluator Kementerian PAN dan RB pada evaluasi SAKIP dan RB tanggal 14 September 2022	20
Tabel II. 7	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2022	21
Tabel III. 1	Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022.....	22
Tabel III. 2	Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022	23
Tabel III. 3	Target dan realisasi Rasio Konektivitas.....	26
Tabel III. 4	Target dan realisasi sasaran strategis 1	27
Tabel III. 5	Target dan Realisasi Jumlah Trayek yang di Akses Tahun 2022	30
Tabel III. 6	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Trayek yang di Akses dengan tahun sebelumnya	31
Tabel III. 7	Target Jumlah Trayek yang di Akses berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 - 2026	31
Tabel III. 8	faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah trayek yang diakses	32
Tabel III. 9	Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja jumlah trayek yang diakses	33
Tabel III. 10	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	35

Tabel III. 11	Perbandingan jumlah penumpang terangkut angkutan umum tahun 2021 dan 2022.....	36
Tabel III. 12	Target Jumlah penumpang terangkut angkutan umum 2021 - 2026.....	37
Tabel III. 13	faktor penghambat indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum	38
Tabel III. 14	Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum.....	39
Tabel III. 15	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dengan Kementerian Perhubungan	44
Tabel III. 16	Target dan realisasi sasaran strategis 1	45
Tabel III. 17	Perbandingan V/C Rasio tahun 2021 dan 2022.....	46
Tabel III. 18	Target V/C rasio dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026.....	47
Tabel III. 19	faktor penghambat indikator kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi	47
Tabel III. 20	Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi	49
Tabel III. 21	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dengan Kementerian Perhubungan.....	53
Tabel III. 22	Target dan realisasi sasaran strategis 3	55
Tabel III. 23	Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2021 dan 2022	56
Tabel III. 24	Target Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dalam Renstra Dinas Perhubungan.....	57
Tabel III. 25	faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	57
Tabel III. 26	Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	58
Tabel III. 27	Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.....	59
Tabel III. 28	Target dan realisasi indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2022.....	61
Tabel III. 29	hasil survei ke masyarakat terhadap pelayanan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.....	61
Tabel III. 30	Target kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.....	62



Tabel III. 31	faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	63
Tabel III. 32	Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.....	64
Tabel III. 33	Rincian anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp.17.260.017.358	65
Tabel III. 34	Realisasi anggaran tahun 2022 sesuai berdasarkan Program	65



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Organisasi

A.1. Latar Belakang

Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 00 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 30 30' Lintang Selatan (LS), dan 980 36' sampai 1010 53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah:


- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat: berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
- d. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat $\pm 42.012,89 \text{ km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ km}^2$, dengan panjang pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ km}$, sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ km}$.

Dengan demikian, posisi Provinsi Sumatera Barat yang strategis berada pada jalur perekonomian dan berada pada lintasan pergerakan antar wilayah di Pulau Sumatera, sehingga memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu lintas barang, orang, dan informasi. Berdasarkan kondisi diatas dipastikan akan menyebabkan tingginya kebutuhan transportasi.

Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor transportasi secara umum masih dihadapkan pada peningkatan infrastruktur, kelancaran dan keselamatan mobilitas angkutan Darat, Laut dan Udara, serta aksebilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai.

Terbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas baru, serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi yang telah ada, tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada wilayah-wilayah terpencil, menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat terpencil kurang dapat berkembang.




Pembangunan pada sektor perhubungan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok daerah, oleh karena itu pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas Provinsi Sumatera Barat dari Gubernur Sumatera Barat sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2026 yaitu dengan mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan.

Dalam rangka mencapai target – target Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut Dinas Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Sumatera Barat di Bidang Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dimana tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan.

Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban, dimana salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, sebagai wujud komitmen organisasi penyelenggara Negara dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Oleh karena itu melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

A.2. Tugas pokok dan fungsi

Menurut Peraturan Gubernur (pergub) Sumatera Barat No. 03 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Sumatera Barat di Bidang Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



Tugas Pokok Dinas Perhubungan yaitu Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan, yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.
- e. Pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan, dan Pelayaran.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.3. Struktur Organisasi

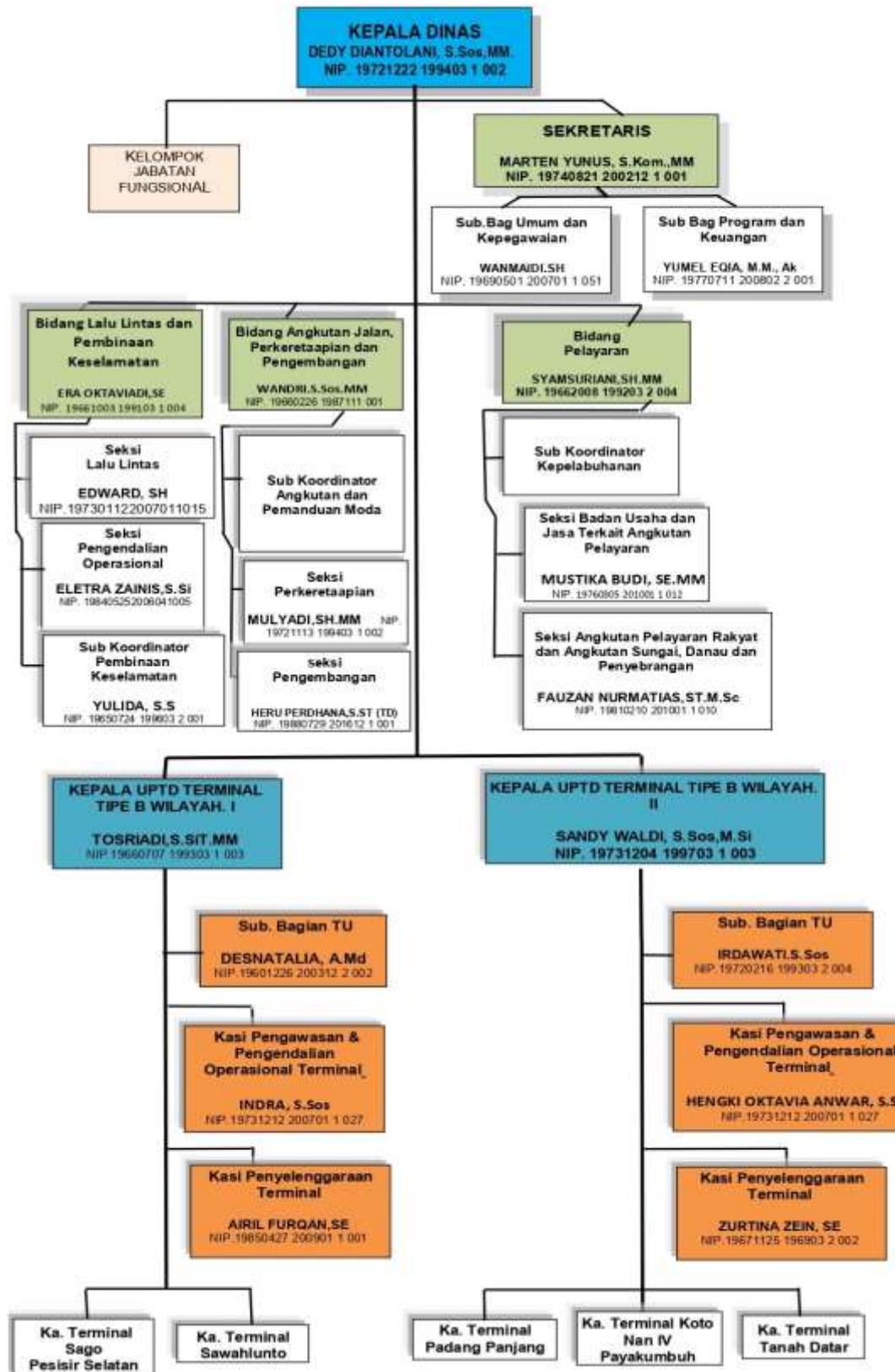
Dasar:

1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 03 tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 19 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
3. Persetujuan Penyederhanaan Birokrasi oleh Kemendagri melalui penyetaraan Jabatan di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sehingga terdapat 3 Jabatan Struktural yang di rubah menjadi Jabatan Fungsional sesuai Keputusan Menpan RB nomor : 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah.

Berdasarkan hal diatas, berikut susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022:

KONSEP BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



A.4. Sumber daya Manusia

Jumlah Pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Kondisi Desember 2022 adalah sebanyak 83 Orang, berikut rinciannya:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	BERDASARKAN GOLONGAN	JUMLAH
1	GOL I	-
2	GOL II	31
3	GOL III	41
4	GOL IV	11
	TOTAL	83

Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon


NO	BERDASARKAN ESSELON	JUMLAH
1	ESELON II	1
2	ESELON III	6
3	ESELON IV	14
4	STAF	62
	TOTAL	83

Tabel I. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S.2	11
2	S.1/D.4	31
3	D.3	10
4	D.2/D.1/SLTA	31
5	SLTP/SD	-
	TOTAL	83

Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BERDASARKAN JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	60
2	PEREMPUAN	23
	TOTAL	83




Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Terkait pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah dilakukan kerja sama (MoU) dengan pihak Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat). Dimulai sejak tahun 2014 tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat nomor 384/VI/HK201/STTD-2014 dan nomor 120-4/GSD/2014. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan lagi perpanjangan selama 5 tahun tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat nomor HK.201/6/14/STTD-2019 dan nomor 120-030-PKS/GSB-2019. Dimana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 sudah bertambahnya pegawai teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dari lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD.

Hasil dari MoU tersebut, hingga saat ini kebutuhan pelaksanaan yang sifatnya teknis secara umum sudah dapat terpenuhi. Namun disisi lain tenaga pelaksana yang bersifat administratif masih sangat kurang dari segi kuantitas dan kualitas (kompetensi). Hal ini disebabkan oleh:

- a) Lemahnya pengelolaan dalam hal analisa jabatan dan analisis beban kerja yang menyebabkan komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai belum rasional.
- b) Kompetensi, disiplin, kemampuan, profesionalitas, dan produktifitas sebagian besar PNS belum memadai.
- c) Belum maksimalnya perencanaan SDM yang komprehensif, terintegrasi dan berbasis kinerja.
- d) Kurangnya diklat/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pelaksana sesuai dengan jabatannya.
- e) Penguasaan teknologi informatika dan bahasa asing yang belum memadai, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan interaksi antar bangsa dalam memanfaatkan peluang global, pemasaran investasi dan inovasi masyarakat bangsa, serta pemulihan dan peningkatan citra peradaban bangsa.



Sumber daya Lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan yaitu berupa fasilitas yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Sarana dan prasarana utama di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat antara lain terdiri dari satu gedung utama yang mempunyai 2 lantai yang didalamnya terdapat beberapa ruangan seperti ruangan Kepala Dinas, ruangan Sekretaris, serta 7 ruangan untuk masing – masing bidang atau sub bagian yang ada di kantor Dinas Perhubungan, pada gedung utama tersebut juga memiliki 3 aula, serta memiliki toilet di masing – masing lantainya. Kemudian untuk gedung lain di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yaitu antara lain memiliki 1 bangunan mushola, 1 kantin, 1 gedung gudang, serta 1 gedung tambahan khusus bidang Lalu lintas yaitu gedung seksi Pengendalian Operasional. Kemudian untuk membantu dalam pengamanan pada pintu masuk dan keluar kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat juga memiliki pos satpam. Untuk kondisi gedung yang terdapat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, semua gedungnya masih layak digunakan, namun masih perlu dilakukannya pemeliharaan setiap tahunnya.

Sarana dan prasarana tambahan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, untuk fasilitas tambahan dalam bidang teknologi informasi antara lain sudah dilengkapi dengan beberapa komputer di masing – masing bidang serta memiliki jaringan internet yang lumayan bagus. Kemudian untuk sarana penunjang untuk bagian transportasi Dinas Perhubungan juga memiliki beberapa kendaraan dinas, kendaraan dinas bagian pengendalian operasional, bus sedang, serta satu mobil derek. Untuk keadaan semua kendaraan dinasnya masih bagus dan masih bisa membantu operasional pekerjaan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

B. Aspek Strategis Organisasi

Menurut Peraturan Gubernur (pergub) Sumatera Barat No. 03 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Sumatera Barat di Bidang Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Sumatera Barat. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a) Belum baiknya tingkat pelayanan terminal penumpang utamanya tipe B dari aspek jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;
- b) Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya;
- c) Masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya dan perlintasan sebidang kereta api mengakibatkan belum tercapainya target penurunan kecelakaan.
- d) Masih Rendahnya Kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana Perhubungan

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dapat diperoleh melalui analisis Renstra Kementerian Perhubungan dan Analisis telahaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Tabel I. 5 Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
1	Tingginya pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan yang berdampak	Tingkat kepatuhan perusahaan transporter dan pemilik barang masih rendah	1. Perlunya penguatan terhadap regulasi terkait pengaturan, pembinaan, pengawasan dan sumber daya manusia 2. Dukungan dari stakeholder yang	Dalam menekan tingginya pelanggaran Over Dimensi Over Loading yang sangat berdampak kepada

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
	kepada keselamatan pengguna jalan		terkait unsur Perhubungan	keselamatan pengguna jalan harus dilaksanakannya penegakan hukum secara komprehensif dan berkelanjutan
2	Belum optimalnya pelabuhan penyeberangan yang ada untuk melayani pergerakan orang dan barang antar pulau dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (konektivitas antar pulau)	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas antar pulau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan angkutan penyeberangan di Provinsi Sumatera Barat sudah menjadi bagian dari cetak biru pengembangan transportasi penyeberangan tahun 2010 – 2030 2. Perlunya penguatan terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan dan sumber daya manusia 	Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan angkutan sungai danau dan penyeberangan (memantapkan lintas penyeberangan antar negara, pelabuhan angkutan penyeberangan serta pengembangan dermaga penyeberangan)
3	Masih ada wilayah kepulauan dan pesisir yang belum terpenuhinya prasarana, sarana dan layanan transportasi yang memadai dalam memperkuat poros maritim di Provinsi Sumatera Barat	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam memperkuat poros maritim di Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelimpahan kewenangan pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2. Kewenangan daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan 	Sistem jaringan transportasi laut meliputi tatanan kepelabuhanan (pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan regional seperti pelabuhan Tua Pejat (Kep. Mentawai), pelabuhan Siuban (Kep. Mentawai), pelabuhan Muara Siberut (Kep. Mentawai), pelabuhan Muaro Padang (Padang), pelabuhan pengumpan

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
				lokal) dan alur pelayanan (dikembangkannya disepanjang perairan laut dalam)
4	Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan di berbagai moda transportasi	Belum seimbangnya antara kebutuhan dan penyediaan sarana prasarana transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kajian terhadap kebutuhan pelayanan transportasi 2. Penguatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi 	Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan (trans Sumatera, pembangunan jaringan jalan bebas hambatan), jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (terminal penumpang tipe B di lima Kabupaten/Kota
5	Penurunan Level of Service (LoS) jalan yang ditandai peningkatan rasio volume dibandingkan kapasitas jalan salah satunya disebabkan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi	Peningkatan volume lalu lintas di bandingkan kapasitas jalan yang tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan 2. Terlaksananya Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan 3. Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi 	Pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas jalan dalam rangka peningkatan Level Of Service (LOS) jalan


No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
6	Belum optimalnya moda alternatif angkutan barang untuk mengurangi beban jalan (transportasi jalan rel (kereta api) di Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan Trans Sumatera Railways System	Tingginya Pergerakan Angkutan Barang dibandingkan Angkutan Orang di Provinsi Sumatera Barat	Sistem jaringan transportasi yang meliputi jaringan kereta api (rencana pengembangan jalur utama, jalur lokal dan pengembangan prasarana serta sarana kereta api antar kota)
7	Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis Perhubungan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan	Masih rendahnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan	1. Kewenangan pengelolaan terminal tipe B dan pelabuhan pengumpan regional memerlukan SDM yang berkompeten 2. Kewenangan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan memerlukan tenaga SDM penegak hukum bidang perhubungan (PPNS)	Dengan peningkatan kompetensi SDM Perhubungan dapat mewujudkan pelayanan transportasi yang optimal

C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu kritikal yang mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan yang dihadapi oleh Sektor Perhubungan di Provinsi Sumatera Barat atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap kinerja Sektor Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Berbagai permasalahan pembangunan bidang perhubungan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan, mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang perhubungan.

Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program



kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Kab/Kota, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Kemudian berdasarkan hasil analisis tim penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat maka ditetapkanlah Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Mengupayakan penurunan angka kecelakaan lalu lintas, baik yang terjadi di Jalan Raya dan Perlintasan sebidang.
2. Mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana terminal type B.
3. Penanganan terpadu danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak)
4. Mendukung pelaksanaan program tol laut dan angkutan perintis melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan di wilayah barat Sumatera, dan mendorong jalur pelayaran wilayah barat Pulau Sumatera sebagai jalur alternative pelayaran selain selat malaka.
5. Reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)-Solok- Muara Kalaban (Sawahlunto).
6. Mendorong reaktivasi dan konektivitas jalur kereta api Sumatera Barat dan Riau

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, yang meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2022. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 serta Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah: “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.

Upaya yang dilaksanakan untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut adalah dengan menetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dimana untuk Dinas Perhubungan mendukung pencapaian Misi 6.

Tabel II. 1 Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Daerah		
Misi 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Dan Merata IK: Indeks Kinerja Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi	Rasio Konektivitas

Strategi dan Kebijakan

Untuk mendukung dan mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam misi ke-6, strategi dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang adalah dengan menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel II. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi: "Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan"			
Misi 6: "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Mengintegrasikan sistem transportasi antar intermodal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah – daerah terpencil2. Dukungan akses transportasi ke sentra produksi pertanian dan perikanan3. Dukungan keterpaduan transportasi antar moda (bandara, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun Kereta Api)
		Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan sistem perijinan transportasi2. Perbaikan sarana dan prasarana terminal Tipe B3. Pengembangan jaringan pelayanan angkutan

Visi: "Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan"			
Misi 6: "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penguatan kelembagaan dan standar pelayanan Angkutan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun konektivitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, objek wisata dan simpul transportasi 2. Penyusunan regulasi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan transportasi sesuai dengan kewenangan 3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
		Peningkatan dan pengembangan fasilitas keselamatan transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi 2. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan 3. Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perizinan serta standar pelayanan 4. Membangun kesadaran masyarakat dan penegakan hukum tertib berlalu lintas

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terpadu”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 2 Misi, yaitu:


1. Meningkatkan Pembangunan dan mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi dengan cara meningkatkan Pelayanan, Fungsi Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya secara ringkas, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel II. 3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Organisasi	Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas
Terwujudnya keselamatan Transportasi	Rasio angka Kecelakaan lalu lintas
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi



Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 4 Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah trayek yang di akses	Trayek	5	5	5	5	5	5
		Jumlah Penumpang Terangkut angkutan umum	Orang	18.000.000	19.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
2	Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan Provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	Rasio	0,54	0,52	0,50	0,48	0,47	0,45
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	BB 70,00	BB 71,00	BB 71,50	BB 72,00	BB 72,50	BB 73,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	%	78%	79%	80%	81%	82%	83%

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah rencana pencapaian target yang menjadi sasaran bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan Perhubungan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan tahun 2022 adalah tahun awal untuk Renstra Dinas Perhubungan periode tahun 2021-2026, dikarenakan untuk tahun 2021 merupakan bagian dari Renstra Dinas Perhubungan 2016 – 2021 dan merupakan tahun dasar (Kondisi Awal) terhadap target pada Tahun 2022.

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2022

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,52
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	79%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.942.449.099	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.197.397.002	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	943.666.538	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	120.676.000	APBD
JUMLAH		9.204.188.639	APBD

Setelah Anggaran 2022 dilaksanakan, dan dalam rangka menindaklanjuti saran evaluator Kementerian PAN dan RB pada evaluasi SAKIP dan RB tanggal 14 September 2022, Dinas Perhubungan Sumatera Barat melakukan perubahan meliputi:

1. Penyempurnaan atau merubah sasaran dan indikator terkait kinerja internal organisasi.

Tabel II. 6 saran evaluator Kementerian PAN dan RB pada evaluasi SAKIP dan RB tanggal 14 September 2022

Sasaran dan Indikator Lama	Penyempurnaan Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi
Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi

2. Perubahan anggaran menyesuaikan dengan kondisi anggaran setelah anggaran perubahan, dimana terjadi perubahan pagu dana Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk efektifitas dalam kebutuhan pelaksanaan realisasi keuangan.

Perubahan yang dilakukan dalam rencana pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yaitu:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN : 2022

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,52
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	79%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.326.828.998	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.718.357.794	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	623.939.538	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	90.171.250	APBD
JUMLAH		8.759.297.580	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (performance gap), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sebagai informasi tambahan metodologi pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.

Tabel III. 1 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Kurang

B. Hasil Pengukuran Kinerja


Dari 4 Sasaran Strategis ditetapkan 5 Indikator Kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Trayek Yang Diakses
2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
3. V/C Rasio di jalan Provinsi
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
5. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel III. 2 Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek	6 Trayek	120 %
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 orang	18.650.012 orang	98,15 %
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,52	0,53	98,07
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 BB	71,83	101,16 %
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	79%	79,58%	100,73 %
Rata – rata Capaian					103,62 %

Untuk persentase (%) capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:



a. $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

(Jika Realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik)

b. $\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

(Jika Realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik)

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah bagus. Dari 5 (lima) indikator tersebut rata-rata capaian indikator kinerja sasaran dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

C. Capain Kinerja Organisasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 Dinas Perhubungan memiliki tujuan Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dengan Indikator Kinerja tujuan adalah Rasio Konektivitas.

Rasio Konektivitas merupakan persentase wilayah Sumatera Barat yang sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut.

Berikut merupakan formulasinya :

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

Rasio konektivitas Provinsi = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$

1. $IK1$ (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi} \times \text{bobot trayek})$ dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut).
2. $IK2$ (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb \times bobot lintas dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)

Note: Untuk bobot trayek atau lintas berdasarkan jumlah perjalanan angkutan (frekuensi), yaitu:

- a) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5 x dalam seminggu), bobot = 1
- b) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 x dalam seminggu), bobot = 0,8
- c) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 x dalam seminggu), bobot = 0,5

1) $IK 1$ (Angkutan Jalan)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi} \times \text{bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}} \\ &= \frac{134 \times 1}{183} \\ &= 0,732 \end{aligned}$$

2) $IK 2$ (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)

$$= \frac{\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb} \times \text{bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan Intas penyeberangan pada provinsi tersebut}}$$

$$= \frac{4 \times 0,5}{4}$$

$$= 0,5$$

Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

Note: Bobot angkutan jalan = 70 dan Bobot untuk ASDP = 30 (sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020)

$$= (0,732 \times 70) + (0,5 \times 30)$$

$$= 51,24 + 15$$

$$= 66,24 / 0,662$$

Rasio Konektivitas 0,662 artinya sebanyak 0,662 atau 66,24% wilayah sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan laut.


Tabel III. 3 Target dan realisasi Rasio Konektivitas

Tujuan			
Meningkatnya konektivitas antar wilayah			
Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
Rasio Konektivitas	0,668	0,662	99,10 %

Berdasarkan target dari Kementerian Perhubungan dan dengan mempertimbangkan kemampuan Provinsi Sumatera Barat dalam melayani wilayah yang ada di Sumatera Barat, serta dengan melakukan penghitungan rasio konektivitas Provinsi pada tahun awal RPJMD 2021 – 2026, maka Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2022 menetapkan target rasio konektivitas yaitu 0,668 artinya target Sumatera Barat sebanyak 0,668 atau 66,80 % wilayah sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan laut, namun untuk realisasinya hanya 0,662 atau dengan capaian sebesar 99,10 %.

Tidak tercapainya target rasio konektivitas ini disebabkan beberapa hal, salah satunya yaitu adanya angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek, dimana hal itu mempengaruhi kepada variabel perhitungan rasio konektivitas.

Kemudian untuk mengatasi hal itu, Dinas Perhubungan pada tahun 2023 akan melakukan Pengawasan angkutan AKDP kewenangan Provinsi dimana untuk pengawasan akan dilakukan langsung ke Perusahaan



Angkutan, serta akan memberikan teguran kepada pengusaha AKDP yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek.

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan memiliki tujuan meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja tujuan rasio konektivitas, kemudian untuk sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi dan indikator kinerja sasarannya yaitu jumlah trayek yang di akses dan jumlah penumpang terangkut angkutan umum.

Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

C.1 Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi)

Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi" dengan 2 buah indikator kinerja:

1. Jumlah trayek yang diakses
2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum


Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 4 Target dan realisasi sasaran strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek	6 Trayek	120 %
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 orang	18.650.012 orang	98,15 %

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pelayanan jasa transportasi di Sumatera Barat pada tahun 2022, rata-rata sebesar 109,07 % dan dalam skala pengukuran kategori Sangat Baik.

Dari 2 (dua) indikator kinerja pada sasaran 1 (satu), 1 Indikator melewati target, dan 1 indikator perlu peningkatan pencapaian realisasi.



Selanjutnya capaian masing-masing indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

C.1.1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Berdasarkan tabel diatas, analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1, yaitu :

1. Indikator Kinerja Jumlah Trayek yang diakses

Jumlah Trayek yang di Akses di tahun – n

Pencapaian indikator ini dapat dilihat dengan adanya pendataan wilayah yang belum terakses moda transportasi, rekomendasi penambahan trayek angkutan perintis, serta adanya pengawasan angkutan yang telah beroperasi, dan didorong dengan adanya koordinasi yang baik antar Kab / Kota / KL dalam pengawasan angkutan yang dilakukan.

Berdasarkan:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No KP-DRJD 3385 Tahun 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2022;
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP.1028/DJPL/2021 tanggal 25 November 2021 tentang jaringan trayek angkutan laut perintis Tahun Anggaran 2022

Maka berdasarkan surat keputusan tersebut, untuk jumlah trayek angkutan perintis pada tahun 2022 memiliki 6 trayek, namun 1 trayek pada awal tahun 2022 belum diresmikan, sehingga untuk targetnya yaitu sebanyak 5 trayek, yaitu:

- a) 3 trayek angkutan perintis Damri (Kab Dharmasraya, Kab Pasaman Barat, dan Kab Padang Pariaman),
- b) 2 trayek angkutan laut perintis, yaitu trayek R-3 (yang dilayani oleh KM. Sabuk Nusantara 37) dan trayek R-4 (yang dilayani KM. Sabuk Nusantara 68)

Berikut data lintasan trayek angkutan perintis sebagai berikut:

Tabel III. 5 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No KP-DRJD 3385 Tahun 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2022

Trayek yang dilayani	Jarak (Km)	Kab / Kota	Keterangan
Pulau Punjung - Sei Rumbai - Sitiung III	41	Dharmasraya	1 Trayek
Pulau Punjung - Sikabau - Simp. 3 Koto Baru - Ampalu	40	Dharmasraya	
Terminal Simpang IV - Bateh Samui	39	Pasaman Barat	1 Trayek
Terminal Simpang IV - Batas Sumbar Sumut	96	Pasaman Barat	
Tua Pejat - Rokot (Kab. Kepulauan Mentawai)	45	Kab. Kep. Mentawai	Diresmikan pada pertengahan tahun 2022, dan dilakukan pengawasan pada APBD Perubahan
Pariaman - Urek Kaji - P.Kambar - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman	24	Kab Padang Pariaman	1 Trayek
Poltekel Sumbar - Pasar Usang - Lubuk Alung - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman	31	Kab Padang Pariaman	
TOTAL			3 TRAYEK

Tabel III. 6 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.1028/DJPL/2021 tanggal 25 November 2021 tentang jaringan trayek angkutan laut perintis Tahun Anggaran 2022

Armada Kapal	Trayek	Ket
KM. Sabuk Nusantara 37 1.200 GT (tonase kotor)	Trayek R-3 Teluk Bayur - 40 - Panasahan - 72 - Tua Pejat - 40 - Siberut / Mailepet - 26 - Sikabalu / Pokai - 12 - Labuhan Bajau - 40 - Sigologolo - 17 - Saeru - 34 - P.Tello - 48 - Teluk Dalam - 97 - Sibolga - 97 - Teluk dalam - 48 - P.Tello - 34 - Saeru - 17 - Sigologolo - 80 - Air Bangis	1 Trayek R3 = lama hari berlayar adalah 13 hari dengan 28 voyage, 984 mil

Armada Kapal	Trayek	Ket
	- 92 - Labuhan Bajau - 12 - Sikabaluhan / Pokai - 26 - Siberut / Mailepet - 40 - Tua Pejat - 72 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur	
KM. Sabuk Nusantara 68 2.000 GT (tonase kotor)	Trayek R-4 Teluk Bayur - 89 - Labuhan Bajau - 12 - Sikabaluhan / Pokai - 12 - Muara Saibi / Subeleng - 14 - Siberut / Mailepet - 20 - Peipei / Mabukkuk - 30 - Tua Pejat - 72 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur - 40 - Panasahan - 72 - Tua Pejat - 18 - Sioban - 33 - Pasapuat - 13 - Sikakap - 62 - Sinakak - 62 - Sikakap - 90 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur - 120 - Sikakap - 13 - Pasapuat - 33 - Sioban - 16 - Tua Pejat - 72 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur	1 Trayek R4 = lama hari berlayar adalah 14 hari dengan 25 voyage, 1013 mil
TOTAL		2 TRAYEK
TOTAL TRAYEK ANGKUTAN PERINTIS		5 TRAYEK

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berikut tabel target dan realisasi indikator kinerja Jumlah trayek yang di Akses

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Jumlah Trayek yang di Akses Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Trayek Yang diakses	5 Trayek	6 Trayek	120 %

Dengan target berdasarkan renstra yaitu 5 trayek dapat terealisasi sebesar 6 trayek dengan capaian kinerja 120 %.

Hal itu dikarenakan untuk jumlah trayek yang di akses tahun 2022 yaitu menjadi 6 trayek dengan adanya peresmian trayek transportasi Damri oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wil III Sumatera Barat selaku pelaksana kegiatan pelayanan angkutan perintis, dimana untuk saat ini trayek yang baru diresmikan tersebut mempunyai 2 (dua) bus Damri yang melayani rute Tua Pejat – Rokot (Kab. Kep. Mentawai).

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut tabel Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja jumlah trayek yang di akses

Tabel III. 8 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Trayek yang di Akses dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja		Target		Realisasi		% Capaian	
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Jumlah Trayek yang Diakses	Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek	5 Trayek	5	6	100 %	120 %

Indikator kinerja Jumlah trayek yang diakses dengan target berdasarkan renstra yaitu sebesar 5 Trayek pada tahun 2021 dan 2022, namun untuk tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 6 Trayek dengan capaian kinerja 120 %.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berikut tabel indikator kinerja jumlah trayek yang di akses dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026

Tabel III. 9 Target Jumlah Trayek yang di Akses berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 - 2026

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah trayek yang di akses	5 trayek	5 trayek	5 trayek	5 trayek	5 trayek	5 trayek

Berdasarkan target pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026, yaitu 5 trayek. Namun untuk tahun 2022 menjadi 6 trayek dikarenakan adanya peresmian trayek

transportasi Damri yang melayani rute Tua Pejat – Rokot (Kab. Kep. Mentawai).

d) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel III. 10 faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah trayek yang diakses

Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor Pendorong
Jumlah Trayek Yang Diakses	Untuk pengawasan angkutan laut perintis permasalahannya yaitu cuaca yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan pengawasan, sehingga kegiatan pengawasan dilakukan pada hari yang lain	Faktor pendorong terkait jumlah trayek yang diakses, selain adanya peresmian trayek angkutan perintis damri di Kab. Kep. Mentawai, hal ini dapat dilihat juga dengan adanya pengawasan angkutan perintis yang telah beroperasi (Angkutan Perintis Damri dan Angkutan Laut Perintis) dan didorong dengan adanya koordinasi yang baik antar Kab / Kota / KL dalam pengawasan angkutan yang dilakukan.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran sangat menentukan dalam pencapaian target kinerja. Karena dalam Target Kinerja SKPD, yang diukur tidak hanya pencapaian fisik dari kegiatan, tetapi juga realisasi keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Karena hal ini memperlihatkan sesuai atau tidaknya proses perencanaan dengan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan. Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait pengawasan

angkutan perintis yang menjadi kinerja jumlah trayek yang di akses

Tabel III. 11 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja jumlah trayek yang diakses


Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Bertambah / Berkurang	Realisasi Anggaran
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	95.440.000	109.780.000	14.340.000	81.529.849
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	115.620.000	115.620.000	0	114.823.520,00

Analisis Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Pencapaian target kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja jumlah trayek yang diakses, yaitu:

- a) Melakukan Pengawasan Angkutan Perintis (Damri) yang beroperasi pada 4 (empat) daerah yaitu Kab Dharmasraya, Pasaman Barat, Padang Pariaman, dan Kab.Kep. Mentawai.

Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui seberapa jauh tingkat perkembangan pelayanan angkutan perintis dan mengawasi trayek yang dilayani oleh angkutan perintis berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No : KP-DRJD 3358 Tahun 2021 tentang penetapan jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2022, serta untuk mengetahui faktor penyebab atau hal – hal yang dapat mengganggu pelaksanaan angkutan perintis sehingga dapat diambil langkah – langkah pemecahan masalah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, serta



nantinya dapat di koordinasikan dengan BPTD Wil III Sumatera Barat selaku pelaksana kegiatan pelayanan angkutan perintis maupun Perum Damri selaku Operator.

- b) Melakukan pengawasan angkutan perintis di pelabuhan-pelabuhan singgah serta pengawasan pengoperasian angkutan laut perintis, dimana untuk Provinsi Sumatera Barat dilayani oleh 2 (dua) unit kapal angkutan laut perintis yaitu KM. Sabuk Nusantara 37 untuk trayek R-3 dan KM. Sabuk Nusantara 68 untuk trayek R-4

Pelaksanaan kegiatan ini selain melakukan Pengawasan trayek yang dilayani berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP.1028 / DJPL / 2021 tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran Tahun 2022 , juga dilakukan Pengawasan pemberlakuan tarif kapal apakah telah sesuai dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat, serta mengawasi fasilitas yang tersedia di Pelabuhan singgah.

Pada kegiatan ini dinas perhubungan juga melakuka rapat dengan instansi terkait, membahas usulan jaringan trayek untuk tahun 2023, dan hasilnya disampaikan ke kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla) dan sudah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP-DJPL 675 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 12 Agustus 2022

2. Indikator Kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum

Jumlah penumpang terangkut di Terminal Tipe B pada tahun-n

Data diperoleh dan didapatkan dari rekapan penumpang terangkut di 5 Terminal Tipe B yang ada di Sumatera Barat, yaitu:

- a) Terminal Tipe B Bukit Surungan Kota Padang Panjang
- b) Terminal Tipe B Koto Nan IV Kota Payakumbuh
- c) Terminal Tipe B Piliang Kab Tanah Datar
- d) Terminal Tipe B Sago Painan Kab Pesisir Selatan
- e) Terminal Tipe B Pasar Remaja Kota Sawahlunto

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berikut tabel target dan realisasi indikator jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada tahun 2022

Tabel III. 12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 orang	18.650.012 orang	98,15 %

Berdasarkan renstra tahun 2021 – 2026 target jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada tahun 2022 adalah sebanyak 19.000.000 penumpang terangkut, untuk penetapan target ini diperoleh dengan mempertimbangkan data realisasi penumpang terangkut pada tahun 2021 yaitu sebanyak 18.127.254 orang.

Kemudian untuk realisasi penumpang terangkut pada tahun 2022 adalah sebanyak 18.650.012 orang, sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 98,15 %.

Berikut data jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada masing – masing terminal Tipe B yang ada di Sumatera Barat:

Tabel III. 13 Data Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum 2022

Terminal Tipe B	Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
Terminal Tipe B Bukit Surungan Kota Padang Panjang	7.804.003 orang
Terminal Tipe B Koto Nan IV Kota Payakumbuh	4.122.763 orang
Terminal Tipe B Piliang Kab Tanah Datar	2.405.122 orang.
Terminal Tipe B Sago Painan	2.946.003 orang
Terminal Tipe B Pasar Remaja Kota Sawahlunto	1.372.121 orang
TOTAL	18.650.012 orang

Sumber: Data diperoleh dari UPTD Terminal Tipe B wilayah 1 dan wilayah 2 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut tabel perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum tahun 2021 dengan tahun 2022.

Tabel III. 14 Perbandingan jumlah penumpang terangkut angkutan umum tahun 2021 dan 2022

Indikator Kinerja		Target		Realisasi		% Capaian	
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Jumlah Penambahan Penumpang Terangkut	Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	1.000.000 orang	19.000.000 orang	1.127.254 orang	18.650.012 orang	113	98,15

Untuk indikator kinerja ini terdapat perbedaan antara tahun 2021 (Renstra 2016 – 2021) dengan tahun 2022 (Renstra 2021 – 2026), dimana untuk tahun 2021 indikator kinerjanya yaitu terkait Jumlah **penambahan** penumpang

terangkut, sedangkan untuk tahun 2022 indikator kinerjanya yaitu Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum.

Namun untuk data realisasi penumpang terangkut pada tahun 2021 dapat diperoleh pada LAKIP Dishub 2021 yaitu sebanyak 18.127.254 orang, sedangkan untuk tahun 2022 jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada tahun 2022 yaitu sebanyak 18.650.012 orang. Sehingga dapat disimpulkan terjadi kenaikan jumlah penumpang terangkut pada tahun 2022.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berikut target jumlah penumpang terangkut angkutan umum dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026

Tabel III. 15 Target Jumlah penumpang terangkut angkutan umum 2021 - 2026

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n							
	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Jumlah Penumpang Terangkut angkutan umum	18.000.000	18.127.254	19.000.000	18.650.012	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000

Berdasarkan renstra 2021 – 2026 dapat dilihat target untuk jumlah penumpang terangkut angkutan umum dari tahun 2021 sampai dengan target kinerja akhir renstra pada tahun 2026.

Dengan realisasi pada tahun 2022 ini yaitu sebesar 18.650.012 orang, dan jika dibandingkan dengan target pada akhir renstra (2026), maka capaiannya baru sebesar 77,70 %, sehingga hal ini nantinya akan dilakukan upaya – upaya peningkatan realisasi pada tahun – tahun selanjutnya (2023 – 2026).

d) Analisis Penyebab Kegagalan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel III. 16 faktor penghambat indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor Penghambat	Solusi
Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelayanan, perizinan, dan Pengawasan angkutan umum • Belum optimalnya sarana dan prasarana transportasi yang melayani • Belum memadai kuantitas, kualitas dan kualifikasi SDM Perhubungan dalam memberikan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek, sehingga dari data tidak dapat diketahui apakah suatu lintasan trayek masih dilayani oleh angkutan atau tidak • Adanya angkutan umum yang tidak beroperasi, sehingga menyebabkan tidak terdatanya penumpang di terminal • Adanya naik turun penumpang yang dilakukan di luar Terminal sehingga tidak terdata penumpang yang naik dan turun di terminal • Adanya angkutan liar yang beroperasi (travel liar) sehingga menurunkan minat menggunakan angkutan umum 	<p>Untuk solusi yang telah dilakukan yaitu adanya upaya meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan dan memperbaiki fasilitas utama dan penunjang yang ada di Terminal Tipe B 2) Melakukan pembinaan kepada SDM yang ada di terminal 3) Melakukan upaya optimalisasi angkutan, seperti pelaksanaan survey load faktor, yang salah satu outputnya dapat dilakukan pengurangan atau penambahan armada angkutan apabila diperlukan 4) Serta upaya – upaya pelaksanaan pemeriksaan laik jalan agar angkutan yang ada dapat berjalan sesuai standar.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait pengawasan angkutan perintis yang menjadi kinerja Jumlah Penumpangterangkut angkutan umum

Tabel III. 17 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum

Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Bertambah / Berkurang	Realisasi Anggaran
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	221.963.00 0	221.963.00 0	0	219.058.48 6
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	75.000.000	84.145.250	9.145.250	81.410.620
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	125.000.00 0	125.000.00 0	0	124.904.73 5
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	259.861.05 0	115.000.00 0	- 144.861.05 0	106.357.19 4
Pelaksana Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	144.802.40 0	144.802.40 0	0	144.734.40 0
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250.000.00 0	242.999.51 0	-7.000.490	238.045.37 8



Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Bertambah / Berkurang	Realisasi Anggaran
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80.000.000	80.000.000	0	69.569.000

Untuk efisiensi anggaran sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu terkait survey load faktor yang sudah dilaksanakan, namun masih terdapat sisa anggaran, sehingga dilakukan efisiensi anggaran pada APBD Perubahan.

Kemudian untuk sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B, berdasarkan Hasil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat terdapat ketidaksesuaian antara keluaran kegiatan dengan rincian anggaran pada RKA. Keluaran pada RKA yaitu Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe B yang ditingkatkan Kapasitasnya sedangkan rinciannya berupa Pengawasan, Pembinaan dan Monitoring Pengelola Terminal Tipe B dan lembur petugas terminal, disarankan untuk membuat kegiatan/sub kegiatan baru yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut, sehingga dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan baru terkait lembur pegawai terminal.




Analisis Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Pencapaian target kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum, yaitu:

- a) Meningkatkan Prasarana Perhubungan
Yaitu kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) serta melakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - Melakukan rehabilitasi saluran air jalan pada Kawasan terminal Koto Nan IV Payakumbuh
 - Pemasangan CCTV di Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
 - Pembangunan WC pada Terminal Bukit Surungan Padang Panjang, Kota Padang Panjang
 - Telah selesainya Pemasangan Kanopi untuk kenyamanan tempat pemungutan retribusi di terminal Sago Painan

- b) Meningkatkan Kualitas SDM dalam Pelayanan Jasa Transportasi
Melaksanakan pembinaan SDM di 5 Terminal Tipe B (Terminal Sago Painan Kab Pesisir Selatan, Terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang, Terminal Koto Nan IV Kota Payakumbuh, Terminal Piliang Kab Tanah Datar, dan Terminal Kota Sawahlunto)

- c) Mengoptimalkan trayek angkutan umum
 - Pelaksanaan Survey Load Faktor Angkutan Umum, yang hasilnya dapat digunakan untuk penghitungan kebutuhan armada angkutan umum, mengetahui data – data perizinan angkutan umum, dan untuk mengetahui angkutan yang melakukan penyimpangan trayek.
 - Tersedianya Pelayanan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU)

- 
- d) Meningkatkan moda transportasi dalam kondisi baik
 - Melakukan pemeriksaan laik jalan kendaraan (Rampcheck)

C.1.2. Perbandingan Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi) dengan Standar Nasional (Kementerian Perhubungan)

1. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan


Berdasarkan 7 (Tujuh) prioritas nasional yang terdapat pada RPJMN 2020-2024, salah satunya yaitu “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”.

Kemudian dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Presiden pada Tahun 2020 – 2024 dimana untuk sektor perhubungan mempunyai fokus kegiatan yang harus ditangani untuk menunjang capaian misi, terutama pada misi 2, misi 3 dan misi 4, maka hal ini menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan Penyusunan rencana strategis pada tahun 2020 – 2024.

Visi Kementerian Perhubungan adalah “Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi
3. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan

- 
5. Mewujudkan penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan."

Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka ditetapkan beberapa misi, dimana untuk sektor perhubungan terdapat pada misi ke 6 (enam) "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan".

Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 tersebut adalah "terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata".

Misi 6 ini diuraikan menjadi 5 sasaran, dimana salah satunya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, yaitu: "Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi" dengan Indikator Kinerja yaitu Rasio Konektivitas.

Kemudian sebagai OPD Penanggung Jawab, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tujuan – tujuan yang harus dicapai berdasarkan renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Dengan demikian menunjukkan bahwa adanya relevansi antara visi misi Kementerian Perhubungan, visi misi Kepala Negara dan Kepala Daerah periode berjalan dengan dukungan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam membantu mewujudkan visi misi tersebut, dimana kata kunci dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan secara umum yaitu terkait pembangunan infrastruktur yang dapat membantu penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar Kawasan serta meningkat keselamatan transportasi.

Tabel III. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dengan Kementerian Perhubungan

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran		2022			
						Target		Realisasi	
Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Meningkatnya konektivitas antar wilayah IK: Rasio Konektivitas	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Rasio Konektivitas Nasional	Jumlah trayek yang di akses	0,709	5 trayek	0,735	6 trayek
					Jumlah Penumpang Terangkut angkutan umum		19.000.000 orang		18.650.012 orang

Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Kementerian Perhubungan diperoleh dari Peraturan Menteri Perhubungan No PM 80 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, sedangkan untuk data target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan yaitu terkait Rasio Konektivitas, dimana untuk Kementerian Perhubungan rasio konektivitas merupakan indikator kinerja **sasaran**, sedangkan untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Rasio Konektivitas merupakan Indikator Kinerja **tujuan**.

Setelah dilakukan penghitungan Rasio Konektivitas Provinsi yaitu 0,662 atau 66,2 % wilayah Sumatera Barat sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut, dimana untuk variabel yang mempengaruhi Rasio Konektivitas Sumatera Barat yaitu angkutan jalan, dan ASDP (angkutan sungai, danau dan Penyeberangan) yang mana angkutan tersebut membantu dalam menghubungkan antar wilayah di Sumatera Barat.

C.2 Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi)

Sasaran Strategis 2 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi" yang dapat dilihat dari indikator kinerja sasaran V/C Rasio di jalan Provinsi.

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 2 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 19 Target dan realisasi sasaran strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,52	0,53	98,07

Berdasarkan renstra Dinas Perhubungan dan dengan mempertimbangkan data dasar pada tahun 2021, maka ditetapkan target V/C rasio tahun 2022 adalah sebesar 0,52, dan untuk pengukuran V/C Rasio dapat diketahui apabila realisasi semakin tinggi (mendekati 1) maka menunjukkan kinerja lalu lintas yang tidak baik. Pada tabel diatas dapat dilihat untuk target tidak tercapai, dengan capaian sebesar 98,07 %.

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

C.2.1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Berdasarkan tabel diatas, analisa capaian indikator kinerja Sasaran 2, yaitu :

1. Indikator Kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi

$$\begin{aligned} \text{Formula Penghitungan} &= \text{V/C Rasio di jalan Provinsi} \times 100 \% \\ &= \text{Volume} / \text{Kapasitas} \\ &= 1564 / 2950 \times 100 \% \\ &= 0,53 = 53 \% \end{aligned}$$

Note : Untuk penghitungan kapasitas jalan berdasarkan standar MKJI 1997 (manual kapasitas jalan indonesia) dan PKJI (Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia) 2014.



a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berikut adalah Perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan, sehingga untuk realisasi tahun 2022 yaitu:

$$\text{VC Rasio} = \frac{\text{Volume Lalu Lintas kendaraan}}{\text{Kapasitas Ruas Jalan}}$$

$$\text{VC Rasio} = \frac{1564}{2950}$$

$$\text{VC Rasio} = 0,53$$

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui realisasi V/C rasio di ruas jalan provinsi adalah 0,53, sedangkan untuk target berdasarkan renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 adalah 0,52 sehingga persentase capaian dari V/C Rasio adalah sebesar 98,07 %,dikarenakan untuk V/C rasio apabila nilainya semakin besar atau mendekati 1 maka kinerja lalu lintas semakin buruk.

Dapat diketahui kinerja lalu lintas di ruas jalan Provinsi dapat diartikan bahwa kinerja lalu lintas bagus, arus cukup stabil, dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut tabel perbandingan V/C Rasio tahun 2021 dan 2022

Tabel III. 20 Perbandingan V/C Rasio tahun 2021 dan 2022

Indikator Kinerja		Target		Realisasi		% Capaian	
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
V/C Rasio di jalan Provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,54	0,52	0,52	0,53	-	98,07

Untuk tahun renstra 2016 - 2021 belum terdapat sasaran strategis, dan indikator kinerja terkait V/C Rasio. Namun pada tahun 2021 juga menjadi tahun dasar renstra 2021 – 2026, sehingga target dan realisasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel diatas.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berikut tabel target V/C rasio dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026

Tabel III. 21 Target V/C rasio dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n							
	2021	Realisasi	2022	Realisasi	2023	2024	2025	2026
V/C Rasio di jalan Provinsi	0,54	0,52	0,52	0,53	0,50	0,48	0,47	0,45

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk targetnya semakin kecil, karena untuk V/C Rasio dapat disimpulkan jika realisasi tinggi atau mendekati 1 menunjukkan kinerja lalu lintas yang tidak baik.

d) Analisis Penyebab Kegagalan Atau Penurunan Kinerja, Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel III. 22 faktor penghambat indikator kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi

Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor Penghambat	Solusi
V/C Rasio di jalan Provinsi	Belum optimalnya usaha dan upaya yang	<ul style="list-style-type: none"> Adanya angkutan umum yang tidak beroperasi serta adanya angkutan travel liar yang 	Solusi yang sudah dilakukan yaitu adanya

Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor Penghambat	Solusi
	<p>dilakukan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengatasi kecelakaan • meningkatkan keselamatan • serta meningkatkan kinerja lalu lintas 	<p>mendorong penggunaan kendaraan pribadi, hal ini juga disebabkan karena masih banyaknya angkutan yang belum memperpanjang KP, maupun izin trayek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan data pemeriksaan laik jalan dapat diketahui masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan, sehingga Ketika diperjalanan dapat menghambat kinerja lalu lintas yang ada • Masih adanya angkutan atau truk yang ODOL (Over Dimensi Over Load), dimana kondisi ketika barang yang diangkut melebihi kapasitas maksimal dari truk dari sisi berat maupun dimensi, sehingga menyebabkan arus kendaraan ODOL tersebut menjadi lambat di jalan raya dan juga mengakibatkan adanya jalan yang rusak, hal itu mempengaruhi kinerja lalu lintas yang ada • Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait keselamatan lalu lintas 	<p>upaya penindakan yang dilakukan agar tidak ada lagi angkutan orang / barang yang tidak sesuai standar dan tidak laik jalan, karena hal ini menyebabkan kinerja lalu lintas menurun, seperti kendaraan yang kelebihan muatan akan berjalan lambat, ataupun adanya kecelakaan yang terjadi akibat kelebihan muatan, dll</p>

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait V/C Rasio di jalan Provinsi

Tabel III. 23 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi

Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Bertambah / Berkurang	Realisasi Anggaran
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	555.934.500	686.879.582	130.945.082	675.832.633
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	190.917.500	190.917.500	0	178.069.835
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	508.225.659	563.069.659	54.844.000	560.057.011
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.100.000.000	1.100.000.000	0	1.094.214.952
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	21.703.293	9.583.293	-12.120.000	8.013.250
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana uji Berkala Kendaraan Bermotor	44.217.600	44.217.600	0	44.180.600
Pelaksana Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	144.802.400	144.802.400	0	144.734.400


Untuk anggaran pada sub kegiatan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin dimana kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan pengajuan andalalin yang masuk ke Dinas Perhubungan, efisiensi anggaran ini karena target pengawasan sebanyak 5 kali sudah tercapai.




Analisis Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Pencapaian target kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi, yaitu terkait keselamatan yang dapat berdampak kepada kinerja lalu lintas di Sumatera Barat:

- a) Adanya kegiatan Pelaksanaan Razia Gabungan dengan instansi terkait dengan pola sidang ditempat (GAPOLSIPAT) serta kegiatan pemeriksaan laik jalan kendaraan (Rampcheck) pada tahun 2022 dengan target pelaksanaan di Kab / Kota Sumatera Barat, sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kendaraan - kendaraan yang tidak laik jalan, kendaraan yang tidak memiliki izin, kendaraan yang tidak memiliki surat – surat, serta kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, seperti ODOL (Over Dimensi Over Load), yang mana semua ini dapat mempengaruhi kepada kinerja lalu lintas
- b) Adanya pelaksanaan Rapat Koordinasi FLLAJ Prov. Sumbar dengan semua pihak terkait sebanyak 11 kali, serta adanya tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil rapat Forum LLAJ dan pengaduan dari masyarakat yang dilakukan, seperti usulan dari Kab / Kota terkait lokasi Pelaksanaan razia, sosialisasi keselamatan, adanya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan, dll
- c) Adanya kegiatan meningkatkan Pemahaman Masyarakat / stakeholder tentang aturan lalu lintas dengan melakukan Sosialisasi keselamatan LLAJ (Tahun 2022 di Kab. Tanah Datar, Kab Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya, Kep. Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok Selatan)

- 
- d) Melakukan Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di UPUBKB kab / Kota Sumatera Barat, sehingga dengan hal ini diharapkan kendaraan yang diperiksa nantinya dapat benar – benar laik jalan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada
 - e) Serta adanya upaya dalam rangka pengaturan lalu lintas berupa Pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Pengawasan Kendaraan Bermotor di Jalan (STPJ), antara lain yaitu:
 - 1) Pada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan di terminal
 - 2) Pada kunjungan Pejabat Negara ke Provinsi Sumatera Barat
 - 3) Pada pelaksanaan kegiatan Subuh Mubaroqah yang diselenggarakan oleh OPD Provinsi Sumatera Barat
 - 4) Pada pelaksanaan Car Free Day (CFD) yang diselenggarakan oleh OPD Provinsi Sumatera Barat
 - 5) Pada peringatan hari – hari besar yang melibatkan masyarakat sehingga menyebabkan padatnya pergerakan lalu lintas
 - 6) Pada lokasi bencana alam yang menyebabkan gangguan terhadap pergerakan lalu lintas
 - f) Adanya kegiatan terkait penyediaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan di jalan Provinsi, berupa:
 - Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan di ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah – Purus, Kota Padang
 - Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan di ruas Jalan P.056 Simp. Padang Aro - Lubuk Malako Kab. Solok Selatan
 - Pemasangan Rambu - Rambu di Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang
 - Pemasangan Rambu Penunjuk Jurusan dalam mendukung KSPN di Kab.Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan.

- 
- g) Adanya kegiatan Evaluasi dan pengawasan terhadap pernyataan kesanggupan hasil andalalin, dimana kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk mengkaji dampak dari pembangunan terhadap lalu lintas jalan di wilayah Kab / Kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga tercapai keselamatan dan keamanan yang terjamin bagi masyarakat pengguna jalan selama dalam perjalanan


C.2.2. Perbandingan Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi) dengan Standar Nasional (Kementerian Perhubungan)

Tabel III. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dengan Kementerian Perhubungan

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran		2022			
						Target		Realisasi	
Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Terwujudnya Keselamatan Transportasi IK: Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan	V/C Rasio di jalan Provinsi	24,296	0,52	18,23	0,53

Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Kementerian Perhubungan diperoleh dari Peraturan Menteri Perhubungan No PM 80 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, sedangkan untuk data target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian.

Dari tabel diatas dapat untuk keselamatan dan keamanan transportasi Kementerian Perhubungan lebih berfokus kepada meningkatkan keselamatan dan menurunkan angka kecelakaan sehingga indikator kinerja sasarannya yaitu Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan, sedangkan untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam indikator kinerja sasarannya V/C Rasio di jalan Provinsi, dengan harapan setelah melakukan beberapa upaya terkait keselamatan dan keamanan transportasi dapat meningkatkan kinerja lalu lintas di jalan Provinsi, sehingga dapat



ditarik kesimpulan bahwa diantara indikator yang ada pada Kementrian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat belum selaras sepenuhnya, tetapi masing – masing indikator di Dinas Perhubungan Provinsi secara prinsip turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja Kementrian (Pusat).

C.3 Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi)

Pada Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, diukur dengan 1 buah indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 3 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 25 Target dan realisasi sasaran strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 BB	71,83	101,16 %

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3 pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 berdasarkan Nilai SAKIP sebesar 101,16% dan dalam skala pengukuran kategori Sangat Baik

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

C.3.1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

1. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n

Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi.

Bentuk akhir dari SAKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP.



a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Realisasi SAKIP tahun 2022 merupakan hasil penilaian dari SAKIP Tahun 2021 dengan nilai adalah BB (71,83). Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada renstra 2021 – 2026 yaitu BB (71,00), maka dapat diketahui persentase capaian nilai LAKIP Tahun 2021 adalah sebesar 101,16%, ini berarti dalam skala penilaian Sangat Baik.

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi nilai LAKIP tahun 2021 – 2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel III. 26 Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2021 dan 2022

Indikator Kinerja		Target		Realisasi	
2021	2022	2021	2022	2021	2022
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,00)	BB (71,00)	BB (70,14)	BB (71,83)

Untuk tahun 2021 persentase capaian adalah 100,2 % sedangkan untuk tahun 2022 adalah 101,16 %

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berikut ini indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026

Tabel III. 27 Target Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dalam Renstra Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n							
	2021	Realisasi	2022	Realisasi	2023	2024	2025	2026
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB 70,00	BB 70,14	BB 71,00	BB 71,83	BB 71,50	BB 72,00	BB 72,50	BB 73,00

Dapat dilihat pada tabel diatas, untuk realisasi pada tahun 2022 yaitu dengan capaian sebesar 101,16 %.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel III. 28 faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor Pendorong
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Untuk realsiasi tahun 2022 tidak ada permasalahan, realisasi ini merupakan hasil penilaian dari SAKIP Tahun 2021 dengan nilai melebihi target yaitu BB (71,83)	Faktor pendorong yaitu: 1. Adanya rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan 2. Adanya upaya percepatan capaian kinerja agar dapat terlaksana dengan baik 3. Perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program / kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan. 4. Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai. 5. Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan,



Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor Pendorong
		terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun. 6. Adanya Koordinasi yang intens baik internal di Dinas Perhubungan maupun eksternal dengan OPD Mitra (Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi)

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Tabel III. 29 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Bertambah / Berkurang	Realisasi Anggaran
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	120.319.040	20.319.040	118.819.550

Analisis Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Pencapaian target kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, yaitu dengan adanya kegiatan rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan, serta tindak lanjut yang dilakukan atas permasalahan yang ada



C.4 Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi)

Sasaran Strategis 4 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi" dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

C.4.1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

Berdasarkan tabel diatas, analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1, yaitu :

1. Indikator Kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, survei ini dilakukan untuk memperoleh Indeks kepuasan masyarakat. Tujuan pelaksanaan ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.

Berikut dasar penilaian kinerja unit pelayanan yang dilakukan:

Tabel III. 30 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00-64,99	D	Tidak Baik



65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

METODE PENGHITUNGAN:
Perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

- Pilihan A bernilai 4
- Pilihan B bernilai 3
- Pilihan C bernilai 2
- Pilihan D bernilai 1

Contoh Cara Perhitungan
Dari 11 Pertanyaan (untuk responden 1 orang) misalnya:

- 4 Pertanyaan dinilai "A" → 4 X 4 = 16
- 3 Pertanyaan dinilai "B" → 3 X 3 = 9
- 3 Pertanyaan dinilai "C" → 3 X 2 = 6
- 1 Pertanyaan dinilai "D" → 1 X 1 = 1

TOTAL 32
Nilai Maksimal 44 (11 pertanyaan x 4)

Nilai IKM = $\frac{32}{44} \times 100\% = 72,73$ = Mutu Layanan C
(Kurang Baik)

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berikut capaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel III. 31 Target dan realisasi indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	79%	79,58%	100,73 %

Secara Keseluruhan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sektor transportasi sebesar **79,58** dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 32 hasil survei ke masyarakat terhadap pelayanan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
U1	86,525	B	Baik
U2	85,28	B	Baik
U3	80,225	B	Baik
U4	74,025	C	Kurang Baik
U5	75,84	C	Kurang Baik
U6	80,2	B	Baik
U7	80,6225	B	Baik
U8	74,225	C	Kurang Baik
U9	79,275	B	Baik
Rata-rata	79,58		

Berdasarkan data diatas dapat dilihat terdapat nilai IKM masing – masing dari 9 pertanyaan yang dilakukan, dan target yang ditetapkan pada renstra Dinas Perhubungan untuk tahun 2022 adalah 79%, sedangkan realisasi pada tahun 2022 adalah 79,58%, sehingga capaian indikator kinerja sarannya adalah sebesar 100,73%.



b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk tahun 2021 belum terdapat sasaran strategis, dan indikator kinerja terkait pelayanan organisasi

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berikut tabel indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dalam Renstra Dinas perhubungan Tahun 2021 – 2026

Tabel III. 33 Target kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n						
	2021	2022	Realisasi	2023	2024	2025	2026
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	78%	79%	79,58	80%	81%	82%	83%


Berdasarkan tabel diatas masih ada beberapa tahun lagi untuk dapat melihat tingkat kemajuan terkait capaian renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, dikarenakan untuk tahun 2022 merupakan tahun awal dari perencanaan yang ada pada Renstra 2021 – 2026, yang nantinya berdasarkan capaian pada tahun 2022 ini diharapkan bisa menjadi evaluasi untuk pencapaian target pada tahun – tahun selanjutnya.



d) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel III. 34 faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor Pendorong
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Tidak ada permasalahan dalam rangka Pelaksanaan penilaian tingkat kepuasan pelayanan organisasi	Adanya Koordinasi yang baik secara internal di Dinas Perhubungan maupun eksternal dengan masyarakat maupun OPD lainnya, sehingga pelaksanaan penilaian tingkat kepuasan pelayanan organisasi dapat terlaksana dengan baik



e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel III. 35 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Bertambah / Berkurang	Realisasi Anggaran
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	120.319.040	20.319.040	118.819.550

Analisis Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Pencapaian target kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka penilaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi yaitu dengan membagikan kuisisioner terkait pelayanan kepada internal di lingkungan Dinas Perhubungan dan eksternal kepada masyarakat.

D. Realisasi Anggaran

Tabel III. 36 Rincian anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp.17.260.017.358

No	Belanja	Anggaran total	Realisasi (RP)	Persentase Per Anggaran Total
1	Belanja gaji dan tunjangan	8.500.719.778	8.221.061.578	96,71%
2	Belanja Penunjang Urusan	4.326.828.998	4.197.203.965	97,00%
3	Belanja Urusan	4.432.468.582	4.295.280.376	96,90%
	TOTAL	17.260.017.358	16.713.545.919	96,83%

Tabel III. 37 Realisasi anggaran tahun 2022 sesuai berdasarkan Program

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi Anggaran	
			RP	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12.827.548.776	12.418.265.542,80	96,81
B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.718.357.794	3.625.977.943,90	97,52
C	Program Pengelolaan Pelayaran	623.939.538	593.566.487,00	95,13
D	Program Pengelolaan Perkeretaapian	90.171.250	75.735.945,00	83,99
	JUMLAH	17.260.017.358	16.713.545.919	96,83

Untuk mendukung urusan wajib Perhubungan Th. 2022 dialokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp.17.260.017.358**, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp.8.500.719.778**, dan Belanja Langsung (BL) **Rp.8.759.297.580**.

Untuk **realisasi** anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp.8.221.061.578 / (96,71%)** dan **realisasi** anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp.8.492.484.340,70 / (99,90 %)**.





Berikut ini realisasi fisik dan keuangan setelah anggaran APBD Perubahan Tahun 2022:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Anggaran = Rp. 92.378.170,
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 89.935.176, (97,36%)
 - Sisa anggaran = Rp. 2.442.994,
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Anggaran = Rp. 120.319.040,
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 118.819.550, (98,75%)
 - Sisa anggaran = Rp. 1.499.490,
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Anggaran = Rp. 8.500.719.778,
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 8.221.061.578, (96,71%)
 - Sisa anggaran = Rp. 279.658.200,
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Anggaran = Rp. 187.610.000,
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 182.924.500, (97,50%)
 - Sisa anggaran = Rp. 4.685.500,
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Anggaran = Rp. 37.829.750,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp.35.954.721,00,- (95,04%)
 - Sisa anggaran = Rp. 1.875.029,-
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Anggaran = Rp.63.568.640,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp.62.667.800,00,- (98,58%)
 - Sisa anggaran = Rp.900.840,-

- 
7. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Anggaran = Rp. 42.543.000,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 42.466.462,00,- (99,82%)
 - Sisa anggaran = Rp.76.538,-
 8. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 - Anggaran = Rp.45.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 40.444.946,00,- (89,88%)
 - Sisa anggaran = Rp. 4.555.054,-
 9. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - Anggaran = Rp.128.874.750,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp.89.528.331,00,- (69,47 %)
 - Sisa anggaran = Rp.39.346.419,-
 10. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Anggaran = Rp.95.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp.94.840.790,00,- (99,83 %)
 - Sisa anggaran = Rp.159.210,-
 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Anggaran = Rp.68.076.949,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 67.851.846,- (99.67 %)
 - Sisa anggaran = Rp. 225.103,-
 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Anggaran = Rp.35.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 34.989.000,00,- (99.97%)
 - Sisa anggaran = Rp.11.000,-
 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Anggaran = Rp. 11.556.760,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 11.355.500,00,- (98,26%)
 - Sisa anggaran = Rp. 201.260,-


- 
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Anggaran = Rp. 156.309.800,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 155.343.800,00,- (99,38 %)
 - Sisa anggaran = Rp. 966.000,-
15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Anggaran = Rp. 55.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 54.988.258,00,- (99,98 %)
 - Sisa anggaran = Rp. 11.742,-
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Anggaran = Rp. 26.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 25.935.000,- (99,75 %)
 - Sisa anggaran = Rp. 65.000,-
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Anggaran = Rp. 345.576.025,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 345.386.684,00,- (99,95 %)
 - Sisa anggaran = Rp.189.341,-
18. Pengadaan Mebel
- Anggaran = Rp. 63.312.800,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 60.660.000,- (95,81%)
 - Sisa anggaran = Rp. 2.652.800,-
19. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Anggaran = Rp. 229.686.326,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 216.605.250,00,- (94,30%)
 - Sisa anggaran = Rp. 13.081.076,-
20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Anggaran = Rp. 44.821.520,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 44.395.200,00,- (99,05%)
 - Sisa anggaran = Rp. 426.320,-

- 
21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 14.000.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 13.682.350,- (97,73 %) |
| Sisa anggaran | = Rp.317.650,- |
22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 287.446.660,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 277.318.140,00,- (96,48%) |
| Sisa anggaran | = Rp. 10.128.520,- |
23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 1.699.443.088,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 1.670.284.623,- (98,28 %) |
| Sisa anggaran | = Rp. 29.158.465,- |
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 257.540.720,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp.247.526.030,00,- (96,11%) |
| Sisa anggaran | = Rp. 10.014.690,- |
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 178.100.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100.00% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 177.702.017,80,- (99,78 %) |
| Sisa anggaran | = Rp.397.982,- |
26. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 41.835.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 35.597.990,- (85,09 %) |
| Sisa anggaran | = Rp.6.237.010,- |
27. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 686.879.582,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 675.832.633,09,- (98,39%) |
| Sisa anggaran | = Rp. 11.046.949,- |

- 
28. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 190.917.500,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 178.069.835,81,- (93,27%) |
| Sisa anggaran | = Rp. 12.847.664,- |
29. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 221.963.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 219.058.486,00,- (98,69 %) |
| Sisa anggaran | = Rp. 2.904.514,- |
30. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 84.145.250,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 81.410.620,00,- (96,75%) |
| Sisa anggaran | = Rp. 2.734.630,- |
31. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 125.000.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 124.904.735,- (99,92 %) |
| Sisa anggaran | = Rp. 95.265,- |
32. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 115.000.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 106.357.194,00,- (92,48%) |
| Sisa anggaran | = Rp. 8.642.806,- |
33. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 563.069.659,- |
| Realisasi Fisik | = 100 |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 560.057.011,00,- (99,46%) |
| Sisa anggaran | = Rp. 3.012.648,- |
34. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 1.100.000.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100.00% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 1.094.214.952,00,- (99,47%) |
| Sisa anggaran | = Rp. 5.785.048,- |

- 
35. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- | | |
|--------------------|----------------------------|
| Anggaran | = Rp. 9.583.293,- |
| Realisasi Fisik | = 100 % |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 8.013.250,- (83,62%) |
| Sisa anggaran | = Rp. 1.570.043,- |
36. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 44.217.600,- |
| Realisasi Fisik | = 100 % |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 44.180.600,00,- (99,92%) |
| Sisa anggaran | = Rp. 37.000,- |
37. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 144.802.400,- |
| Realisasi Fisik | = 100 % |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 144.734.400,00,- (99,95%) |
| Sisa anggaran | = Rp. 68.000,- |
38. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 242.999.510,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 238.045.378,- (97,96%) |
| Sisa anggaran | = Rp.4.954.132,- |
39. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| Anggaran | = Rp. 109.780.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 81.529.849,- (74,27%) |
| Sisa anggaran | = Rp.28.250.151,- |
40. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Anggaran | = Rp.80.000.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 69.569.000,00,- (86,96%) |
| Sisa anggaran | = Rp.10.431.000,- |

- 
41. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| Anggaran | = Rp.115.620.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp.114.823.520,- (99,31%) |
| Sisa anggaran | = Rp.796.480,- |
42. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
- | | |
|--------------------|----------------------------|
| Anggaran | = Rp.83.424.538,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp.83.394.330,- (99,96%) |
| Sisa anggaran | = Rp.30.208,- |
43. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| Anggaran | = Rp. 8.160.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 8.160.000,- (100%) |
| Sisa anggaran | = Rp.0,- |
44. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| Anggaran | = Rp.309.735.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp.286.494.719,- (92,50%) |
| Sisa anggaran | = Rp.23.240.281,- |
45. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| Anggaran | = Rp.107.000.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp.100.693.918,- (94,11%) |
| Sisa anggaran | = Rp.6.306.082,- |
46. Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| Anggaran | = Rp.34.920.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp.28.819.350,00,- (82,53%) |
| Sisa anggaran | = Rp.6.100.650,- |



47. Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi

Anggaran	= Rp.55.251.250,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp.46.916.595,00,- (84,91%)
Sisa anggaran	= Rp. 8.334.655,-

Dari 47 Sub Kegiatan diatas, ada 8 sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90 %, penyebabnya antara lain :

- a) Sisa anggaran yang berasal dari sisa gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.279.658.200
- b) Sisa anggaran dari rincian belanja sub kegiatan yang tidak terealisasi
- c) Efisiensi anggaran
- d) Sisa Tender

Sementara 39 kegiatan lainnya dapat mencapai target yang diharapkan, baik dari pencapaian fisik maupun realisasi keuangan.



BAB IV PENUTUP

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2022, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun. Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat dikategorikan sangat Baik dengan nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 103,62 %.


Berdasarkan uraian dan analisis kinerja dari belanja langsung sebagaimana diungkapkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Dinas Perhubungan telah terealisasi fisiknya mencapai 100 % dan akuntabilitas keuangan mencapai 96,83%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan, khususnya Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan senantiasa mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
2. Meningkatkan responsibilitas aparatur terhadap segala permasalahan yang timbul, sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat ditekan/ menurun.
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi di tingkat manajerial, guna pencapaian kinerja yang lebih baik.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang pencapaian target kinerja dinas secara maksimal.

Penyusunan LAKIP 2022 masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi komitmen bersama, untuk perbaiki dan penyempurnaan LAKIP:

1. Mewujudkan dokumen perencanaan kinerja yang didukung dengan target-target indikator kinerja (input, output, outcome) yang terukur.

- 
2. Mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja yang komprehensif dan transparan di masing-masing unit kerja dengan mengacu pada perkembangan data Indikator Kinerja Utama.
 3. Indikator Kinerja Utama betul – betul diaplikasikan sebagai alat evaluasi kinerja untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai program-program pemerintahan dan pembangunan.
 4. Agar setiap Unit Kerja membangun data kinerja yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.
 5. Masing-masing Unit Kerja dapat melakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan didasarkan pada capaian indikator kinerja input, output dan outcome.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Esselon II



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Saleh No. 12 Telp.(0751) 40330 – 40331 – Fax. 40332

PADANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERI NOFIARDI,SE.,MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Maret 2022

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

HERI NOFIARDI,SE.,MM
NIP. 196211101986111001

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1. Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek
		2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,52
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	79%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.942.449.099	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.197.397.002	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	943.666.538	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	120.676.000	APBD
JUMLAH		9.204.188.639	APBD

Padang, Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT


MAHYELDI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


HERI NOFARDI, SE., MM
NIP. 19621119 198611 1 001

Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No 1 Padang, Whatsapp : 0811 7538 111
PADANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERI NOFIARDI,SE.MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Oktober 2022

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

HERI NOFIARDI,SE.MM
NIP. 19621113 198611 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1. Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek
		2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,52
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	79%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.326.828.998	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.718.357.794	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	623.939.538	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	90.171.250	APBD
JUMLAH		8.759.297.580	APBD

Padang, Oktober 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



HERI NOFIARDI, SE. MM
NIP. 19621119198611 1 001

Penghargaan yang diterima Dinas Perhubungan Tahun 2022

Penghargaan yang diterima Dinas Perhubungan Tahun 2022

Penerimaan plakat apresiasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam acara railways safety awards tahun 2022, sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang ikut berpartisipasi dalam pengamanan perlintasan sebidang perjalanan Kereta Api

